

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sekolah Dasar adalah institusi atau lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar selama enam tahun. Pada dasarnya bertugas memberi bekal kemampuan dasar kepada peserta didik tentang hubungan antara warga negara dan negara. Pemberian bekal tersebut dilakukan supaya peserta didik mampu hidup dalam masyarakat, dan sebagai persiapan baginya untuk melanjutkan studinya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan dasar yang dituangkan dalam PP Nomor 28 Tahun 1990 antara lain:

Memberi bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (PP. Nomor 28 Tahun 1990:2)

Upaya mewujudkan apa yang diharapkan oleh PP Nomor 28 Tahun 1990 bukanlah pekerjaan yang mudah. Manusia sebagai subjek pendidikan yang dilatarbelakangi dengan bermacam-macam karakteristik serta lingkungan budaya yang amat heterogen memerlukan pembinaan dan penanganan yang terus menerus. Pendidikan yang diberikan kepada manusia tidak pernah tuntas diwujudkan dan senantiasa mengalami perubahan.

Melalui pendidikan pula berbagai potensi dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan dalam membangun bangsa kearah yang lebih baik. Nana Syaodih (1988:1) menyebutkan bahwa: "pendidikan berisi suatu interaksi antara pendidik dengan terdidik dalam upaya membantu terdidik menguasai tujuan-tujuan pendidikan". Khususnya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).

Sesuai dengan GBPP mata pelajaran PPKN Sekolah Dasar 1994, memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu;

Menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dan memberi bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Depdikbud, 1993:4).

Perilaku yang dimaksud adalah seperti yang tercantum di dalam penjelasan USPN No 2 Tahun 1989 pasal 39 ayat 2, yaitu;

Perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dan masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, atau pun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Dalam buku "*Landasan Operasional Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Persekolahan PPKN*", A. Kosasih Djahiri (1995:4), mengatakan bahwa, misi utamanya PPKN adalah sebagai berikut;

Pendidikan Kewarganegaraan yang mampu membentuk manusia Indonesia menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, memahami dan meyakini hak, kewajiban dan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Negara sehingga tercipta pola kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan demokratis sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan konstitusi.

Selanjutnya A.Kosasih Djahiri (1995:5), mengatakan; PPKN bersama program pengajaran lain diharapkan mampu membina *Manusia Indonesia harapan*, yakni *Insan Pembangunan Indonesia berjiwa Pancasila berkualitas tinggi*. Dalam GBHN 1993 diutarakan ciri manusia Indonesia harapan ialah a.1;

1. beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. berkualitas tinggi, maju, mandiri dan masyarakat
3. mampu membina masyarakat, bangsa dan negara Pancasila dan suasana kehidupan yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antar manusia, masyarakat dan negara serta dengan alam dan lingkungannya serta dengan Tuhan Yang Maha Esa
4. berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat jasmani-rohani cerdas dan kreatif
5. berdisiplin, patriotik dan mantap berbudaya serta beradab
6. produktif dan profesional
7. sadar akan harkat dan martabatnya serta memiliki jati diri kepribadian Indonesia
8. memiliki semangat pengabdian dan tekad membangun masa depan yang lebih baik
9. memiliki sikap kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial yang tinggi dan menjunjung nilai luhur budaya bangsa serta sikap keteladanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
10. memiliki semangat pantang menyerah dan ketahanan yang tinggi
11. berperilaku Pancasila, yakni perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam/kepentingan, kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan/golongan sehingga diatasi dengan musyawarah dan mufakat, serta upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, kurikulum ini secara implisit mengembangkan tiga fungsi peran seperti dijabarkan dalam GBPP PPKN (1993:4).

1. Mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengembangkan dan membina siswa yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku, serta berbudi pekerti luhur.
3. Membina siswa agar memahami dan meyakini hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah dan masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun kurikulum PPKN untuk Sekolah Dasar tahun 1994, merupakan tindak lanjut dari kurikulum 1984, mulai diberlakukan pada tahun ajaran 1994.

Kurikulum 1994 memuat beberapa perbaikan, khususnya dalam penggunaan nama mata pelajaran. Dalam kurikulum 1984 nama mata pelajaran adalah *Pendidikan Moral Pancasila (PMP)*, maka pada kurikulum 1994 nama PMP diubah menjadi *Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)*

Kurikulum PMP 75/84 mengenal tiga tujuan, yakni Tujuan Kurikuler (TK), Tujuan Instruksional Umum (TIU), dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK). TK ditetapkan per-mata pelajaran pada setiap jejang sekolah, sedangkan TIU per Pokok Bahasan (PB) dalam suatu mata pelajaran dan TIK dikembangkan guru per butiran bahan ajar atau Bahan Materi Pelajaran (BMP). PPKN 1994 hanya mengenal dua tujuan saja dalam GBPP, yakni Tujuan Kurikuler (TK) dan Tujuan Pengajaran Kelas (TPK) yang

diutarakan pada setiap awal program kelas dan berlaku untuk tiga catur wulan meliputi 15 Pokok Bahasan (5 PB per cawu).

GBPP PPKN disusun dalam dua bagian, yaitu Bagian pendahuluan yang memuat tentang pengertian, fungsi, tujuan dan ruang lingkup serta rambu-rambu pelaksanaan. Bagian ke dua tentang program pengajaran yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kelas, tujuan kelas (yang harus dicapai peserta didik dalam kelas yang bersangkutan), caturwulan dan alokasi waktu selama satu caturwulan, pokok bahasan dan uraian materi pelajaran.

Pendidikan Kewargaan Negara pernah dipakai dalam kurikulum 1968. Hanya perbedaannya terletak pada segi penekanan pendidikannya.

Dalam kurikulum 1968, pendidikan kewarganegaraan ditekankan pada "warganya" bukan pada "negaranya". Hal ini sesuai dengan timbulnya gerakan Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education Movement), cenderung memperhatikan kebutuhan pribadi warga negara umumnya dan pelajar khususnya.

Berikut ini akan digambarkan penggunaan istilah PKN menurut kurikulum 1968 yang berlaku di sekolah dasar.

TABEL 1.1  
 ISTILAH PKN MENURUT KURIKULUM 1968

Jenis Sekolah	Istilah Yang digunakan	Penjelasan
Sekolah Dasar	Pendidikan Kewarganegaraan	Pelajaran ini merupakan integrasi dari pelajaran Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics)

Sumber: Numan Sumantri (1976)

Isi dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada waktu itu merupakan bahan-bahan yang dianggap baik guna menumbuhkan dan mengembangkan warga negara yang baik. Hal ini sesuai dengan Tujuan Pendidikan Warga Negara dalam Undang-Undang Pendidikan No.4 Tahun 1950, No.12 Tahun 1954 yang berbunyi sebagai berikut; *membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air.*

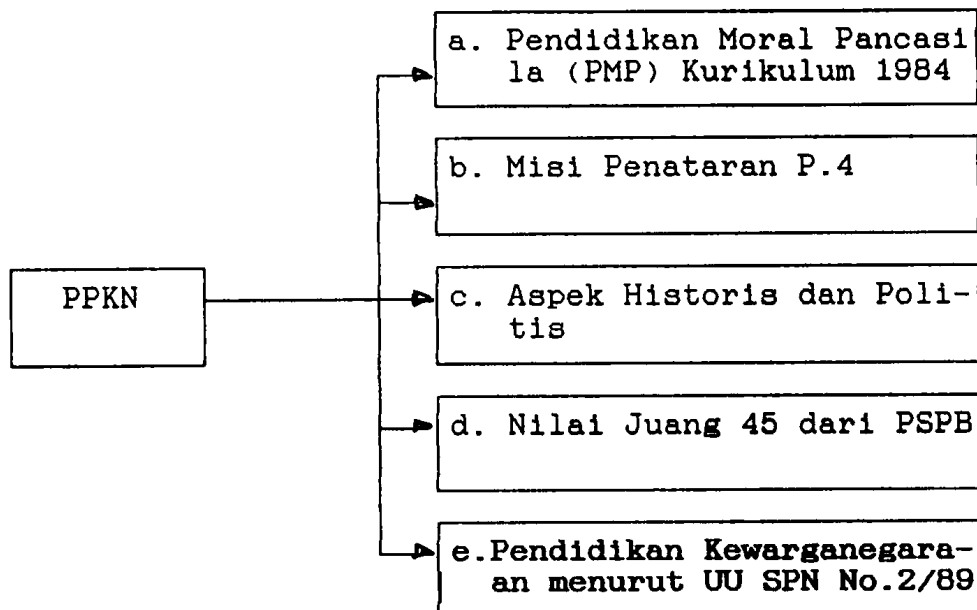
Bahan-bahan yang dibahas antara lain meliputi: nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika, agama, kebudayaan, serta berbagai keputusan dari lembaga legislatif maupun eksekutif sesuai dengan moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut kurikulum PPKN 1994 merupakan usaha membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkaitan dengan hubungan antar warga negara dan negara serta pendidikan bela negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Depdikbud, 1995).

Ada beberapa program pendidikan yang berintegrasi ke dalam PPKN ini diantaranya seperti terlihat dalam bagan di bawah ini;

BAGAN 1.1

PROGRAM PENDIDIKAN DALAM PPKN 1994



Penelitian ini akan mengkaji tentang Pendidikan Kewarganegaraan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989, yaitu membina siswa yang sadar akan hak

dan kewajibannya dan taat pada peraturan yang berlaku di sekolah.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki arti penting dalam rangka pembiasaan dan pembetukan manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, khususnya bagi pembinaan dan pengembangan generasi muda penerus bangsa yang bertujuan untuk mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang pancasilais. Pelaksanaannya antara lain untuk menanamkan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotisme dan harga diri, memperkokoh disiplin (GBHN, 1983).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Medalena Kusharyanti (1986) mengemukakan bahwa:

Pemahaman dan perwujudan semangat kebangsaan dalam tindakan nyata, berarti mengamalkan sila-sila Pancasila. Pelebur semangat kebangsaan semakin penting artinya untuk digunakan sebagai pedoman atau perjuangan dalam mencapai cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa.

Atas dasar penjelasan di atas, pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Masalahnya sekarang adalah kenyataan siswa hidup dalam lingkungan yang sangat beragam, bahkan dalam menghadapi



berbagai kesenjangan dalam masyarakat sebagai dampak globalisasi dan tercermin dalam segenap kehidupan yang senantiasa berubah akan mempengaruhi perilakunya. Masih ditemui perilaku yang kurang sesuai dengan tuntutan tujuan kurikulum, seperti tawuran pelajar antar sekolah, kurangnya kesadaran tentang disiplin. Jika tidak diatasi akan mengganggu kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Sementara itu banyak penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran PMP maupun pengaruhnya bagi siswa, hasilnya menunjukkan apa yang dilakukan oleh guru atau pun hasil yang dicapai oleh siswa masih kurang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Diantaranya sebagaimana terungkap dari penelitian Sunarno (1992) menunjukkan bahwa;

- a) PBM belum mencapai tujuan yang diharapkan,
- b) guru baru memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila kepada siswa,
- c) guru belum mengembangkan dan membina siswa yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari,
- d) guru pembina PMP masih banyak menekan aspek pengetahuan siswa tentang nilai-nilai Pancasila,
- e) guru belum membina sikap dan tingkah laku siswa secara nyata sehingga siswa belum tergugah hatinya untuk mengamalkannya.

Selanjutnya hasil penelitian Umi Chotimah (1994) menunjukkan bahwa;

Guru PPKN belum sepenuhnya mengupayakan pengembangan dan pembinaan siswa yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku, serta metode pendekatan yang lebih sesuai dengan bahan materi pelajaran maupun tujuan PPKN. Salah satu penyebab utamanya adalah karena masih kurangnya pemahaman guru tentang kurikulum GBPP PPKN itu sendiri.

Dari hasil penelitian tersebut di atas secara umum

dapat dikatakan bahwa pengajaran PMP selama ini masih belum memenuhi harapan.

Dalam kurikulum 1994, khususnya PPKN dalam kurikulum SD merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Berdasarkan materi-materi pokok yang ada, maka PPKN mempunyai peran dan posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Mata pelajaran PPKN dalam kurikulum yang berlaku diberikan mulai kelas I sampai kelas VI sekolah dasar dengan alokasi waktu yang sama yaitu dua jam pelajaran per minggu.

Tujuan pengajarannya adalah membina sikap, perilaku dan pengetahuan dasar kepada siswa yang didasarkan kepada nilai Moral Pancasila dalam kehidupan sehari serta sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Menurut Depdikbud dalam buku, *Metodik Khusus Pengajaran PPKN di Sekolah Dasar, (1996)*, mengungkapkan;

Materi PPKN dari kelas I - VI SD pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu; (1) Moral Pancasila dan Budi Pekerti, (2) Hukum Ketatanegaraan Indonesia dan Kewarganegaraan, (3) Sejarah Perjuangan Bangsa.

Aspek moral Pancasila dan budi pekerti mengacu kepada 45 butir nilai dan norma sebagaimana terdapat dalam P-4, ini merupakan hasil ketetapan MPR tahun 1993 melalui TAP MPR Nomor: II/MPR/1993.

Aspek hukum ketatanegaraan Indonesia dan Kewarganegaraan materinya bersumber dari UUD 1945, ketetapan MPR termasuk GBHN dan peraturan perundangan. Selain itu materinya meliputi pula mengenai Hubungan dasar Antar Warga Negara dengan Negara dan Pendidikan pendahuluan Bela Negara.

Aspek sejarah perjuangan bangsa materinya mengenai sejarah perumusan Pancasila, bakti pahlawan bangsa dan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam perjuangan kemerdekaan.

Berdasarkan tujuan pengajaran dan materi Pengajaran PPKN di atas pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara yang diarahkan kepada pembentukan dan pengembangan sikap dan perilaku konkrit yang sesuai dengan tingkat kelas dan lingkungan kehidupan siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam proses belajar mengajar hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahan-bahan yang diajarkan khususnya yang berupa contoh-contoh sikap dan perilaku/perbuatan harus konkrit dan sesuai dengan tingkat kelas dan lingkungan siswa.
2. Lingkup bahan yang diajarkan dimulai dari yang dekat dengan lingkungan kehidupan siswa menuju kepada yang jauh, yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui atau dari pengalaman lama ke pengalaman baru.

3. Penyajian bahan pengajaran beserta contoh sikap perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dimulai dari yang bersifat sederhana menuju ke yang bersifat kompleks/majmuk.
4. Contoh-contoh sikap dan perilaku yang diberikan di samping yang bersifat positif misalnya mentaati tata tertib, disiplin, dan menghormati guru, juga dapat diberi contoh sikap perilaku negatif. Pemberian sikap dan perilaku negatif tersebut terutama yang dikenal siswa dan terjadi di lingkungan sekitar siswa yang sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis siswa. Misalnya, sering terlambat ke sekolah, mengganggu teman belajar, tidak patuh pada guru, tidak disiplin di sekolah, dan suka mengambil barang temannya. Contoh-contoh yang negatif tersebut harus disertai akibat buruk yang ditimbulkannya baik pada diri siswa yang melakukan maupun pada orang lain agar siswa tersentuh hatinya dan menyadarinya untuk tidak melakukan atau menjauhkan diri dari perbuatan yang negatif. Contoh yang diberikan guru hendaknya jangan sampai memberikan trauma (ketakutan yang berlebihan).
5. Dalam rangka membentuk kebiasaan siswa untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, guru dapat melatih dan membiasakan siswa melakukan hal-hal yang dapat menanamkan kebiasaan yang positif. Misalnya untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat, bersih, guru dapat melakukan pemeriksaan kebersihan/kesehatan siswanya setiap hari antara lain memeriksa kebersihan tangan,

kuku, gigi, pakaian dan peralatan sekolah, di samping itu guru harus dapat menunjukkan keteladanan mengenai kebersihan. Kebersihan tertib dapat dilatih dengan memeriksa ketertiban mengikuti pelajaran, ketertiban mengikuti upacara, ketertiban mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru (PR).

6. Agar pelaksanaan proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan secara optimal guru perlu menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi/bahan yang akan disajikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan guru SD di kelas.

Dengan demikian maka fokus masalah dalam penelitian ini ditujukan pada: Pembelajaran segi kewarganegaraan dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang berkenaan dengan fungsi PPKN, yaitu: (a) pengembangan dan pembinaan siswa sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku, serta berbudi pekerti luhur, (b) pembinaan siswa agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah dan masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah proses pembelajaran segi kewarganegaraan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan guru di sekolah

Seperti yang telah kita ketahui bahwa, suatu tujuan kurikulum akan dapat direalisasikan apabila direncanakan

dengan baik. Perencanaan yang baik pun belum cukup tanpa diupayakan dalam bentuk nyata yaitu dilaksanakan dalam proses belajar mengajar (PBM).

Hal ini sejalan dengan pendapat Nana Syaodih Sukmadinata (1988:146), "*Mengajar merupakan suatu upaya yang dilakukan guru agar siswa belajar*".

Menurut Klausemier (Nana Syaodih, 1983:24) memerinci faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah; karakteristik siswa, karakteristik guru, karakteristik perilaku guru dan siswa, karakteristik kelompok, karakteristik fisik situasi belajar mengajar, dan kekuatan-kekuatan dari luar.

Menyimak pendapat di atas, bahwa guru merupakan pemegang kunci keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru harus mampu menciptakan kondisi kelas yang kondusif sesuai dengan yang diinginkan melalui perumusan tujuan, pengembangan materi pelajaran, penentuan metode pengajaran, penggunaan alat dan sumber serta pelaksanaan evaluasi.

Hal tersebut sesuai dari pernyataan di dalam kurikulum dan GBPP PPKN 1994, yaitu;

bahan pelajaran yang tertuang di dalam bagian uraian merupakan bahan minimal yang harus diperkaya guru dengan bahan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada waktu proses belajar mengajar berlangsung.

dalam melaksanakan proses belajar mengajar guru bebas memilih strategi belajar mengajar yang tepat, artinya penggunaan metode dan media dalam pengenalan nilai berbeda dengan pengamalan nilai (Kurikulum PPKN, 1994).

## B. MASALAH

Pada hakikatnya setiap mata pelajaran dalam kurikulum di Indonesia mengemban misi pembudayaan nilai-nilai Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (GBHN 1993). Sekurang-kurangnya PPKN mempunyai peranan yang lebih dibandingkan dengan pelajaran lain. Pada akhirnya anak dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai makhluk sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka untuk memperjelas masalah penelitian, berikut dirumuskan pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini.

1. Bagaimanakah guru mempersiapkan pembelajaran segi kewarganegaraan pokok bahasan "ketahanan, ketulusan, kebersihan, dan ketertiban" dalam kurikulum PPKN 1994 di kelas?
2. Bagaimanakah pelaksanaan proses pembelajaran segi kewarganegaraan pokok bahasan "ketahanan, ketulusan, kebersihan, dan ketertiban" yang dilakukan guru di kelas dengan yang diharapkan dalam kurikulum PPKN 1994?
3. Bagaimanakah guru menilai hasil proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pokok bahasan "ketahanan, ketulusan, kebersihan, dan ketertiban" terhadap siswa?

### C. Definisi Operasional

Untuk memperjelas batasan ruang lingkup penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional, yaitu:

1. Proses pembelajaran PPKN segi kewarganegaraan, yaitu aktivitas siswa lewat proses belajar mengajar yang dapat menerapkan informasi yang tepat, sehingga menghasilkan suatu jenis perbuatan yang berguna bagi siswa yang dilakukan guru dan siswa di kelas.
2. Menurut A.Kosasih Djahiri, (1995:4) Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu usaha membentuk manusia Indonesia menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, memahami dan meyakini hak dan kewajiban, kewenangan, dan kewajiban pemerintah negara sehingga tercipta pola kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan demokratis sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan konstitusi.

Menurut Amir Daien (1973) dalam Nu'man Sumantri (1976), Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pendidikan yang bertujuan agar anak nantinya akan menjadi warganegara yang baik dan berguna bagi tanah air, bangsa dan negaranya.

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan dalam penelitian ini adalah upaya guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang berkaitan dengan segi kewarganegaraan.



#### D. Rincian Pertanyaan

1. Bagaimanakah guru mempersiapkan pembelajaran segi kewarga negaraan dalam kurikulum PPKN di kelas?
  - a. Apakah guru mempersiapkan Satuan Pelajaran sebelum mengajar?
  - b. Bagaimanakah pemahaman guru tentang kurikulum dan GBPP PPKN segi kewarganegaraan dalam kaitannya dengan Satuan Pelajaran?
2. Bagaimanakah kesesuaian antara pelaksanaan proses pembelajaran segi kewarganegaraan yang dilakukan guru di kelas dengan yang diharapkan dalam kurikulum PPKN 1994?
  - a. Bagaimanakah pemahaman guru mengenai Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD?
  - b. Metode apa yang digunakan guru dalam penyampaian materi pendidikan kewarganegaraan?
  - c. Bagaimana guru mengembangkan materi pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar?
  - d. Sumber apa saja yang dipergunakan guru, selain daripada buku paket siswa?
  - e. Sarana/media apa yang dipergunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar?
3. Bagaimanakah guru menilai hasil proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa?
  - a. Apa yang dilakukan guru untuk mengevaluasi kegiatan belajar mengajar?

- b. Bagaimana cara guru menilai bahwa tujuan yang diharapkan sudah tercapai?

#### E. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum PPKN 1994 di tingkat kelas, yaitu bagaimana guru sebagai pelaksana kurikulum di tingkat kelas mengembangkan segi kewarganegaraan yang terdapat di dalam dokumen yang berisi rumusan tujuan, bahan ajaran, kegiatan belajar mengajar dan evaluasi, mulai menerjemahkan, mengembangkan, melaksanakan sampai pada pemerolehan dan penerapan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh masukan tentang:

1. Perencanaan kegiatan guru dalam proses pembelajaran segi kewarganegaraan yang dilakukan guru di kelas.
2. Kesesuaian antara pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas yang diarahkan pada upaya pembentukan sikap dan perilaku yang didasari nilai-nilai Pancasila. Artinya bagaimanakah guru melaksanakan pembelajaran segi kewarganegaraan yang terdapat dalam PB ketahanan, ketulusan, kebersihan, dan ketertiban agar menjadi bagian dari diri siswa sehingga mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama di kelas/sekolah.
3. Cara guru menilai hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran segi kewarganegaraan di kelas.

Dari ketiga aspek yang dideskripsikan dan dianalisis, ini akan diperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan pembelajaran segi kewarganegaraan kurikulum 1994 yang pada akhirnya berpengaruh terhadap siswa, artinya siswa dapat memperoleh nilai luhur dan moral yang dapat diwujudkan dalam perilaku di kelas/sekolah.

Berdasarkan hasil dan analisis, kemudian dicoba untuk memberi saran atau rekomendasi dalam rangka perbaikan pelaksanaan Pembelajaran PPKN dan peningkatan kualitas guru.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Melalui pengkajian konseptual maupun temuan-temuan otentik di lapangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan bahan pemikiran yang bermanfaat, terutama bagi perbaikan pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan pada tingkat sekolah dasar, khususnya kurikulum PPKN segi kewarganegaraan.

Selain itu diharapkan studi ini bermanfaat bagi penulis dalam upaya peningkatan pemahaman peneliti terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan PBM PPKN segi kewarganegaraan, serta untuk lebih memantapkan wawasan dan pengalaman menuju peningkatan kualitas diri. Lebih khusus lagi hasil penelitian ini berguna bagi;

1. Guru kelas, sebagai bahan masukan bagi guru dalam meningkatkan PBM di kelas, pada akhirnya dapat memperkecil kemungkinan ada kesenjangan antara apa yang diharapkan

(kurikulum sebagai dokumen), dengan apa yang dilaksanakan (kurikulum sebagai proses), dan apa yang dicapai siswa (kurikulum sebagai hasil). Disamping itu dapat menjadi titik tolak bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran pokok-pokok bahasan segi kewarganegaraan tidak hanya pemberian pengetahuan dan pemahaman, akan tetapi dalam bentuk perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kepala sekolah, lebih memperhatikan peran guru sebagai pengembang kurikulum di kelas; yaitu turut meningkatkan kepeduliannya terhadap mutu pelaksanaan PBM PPKN segi kewarganegaraan di tingkat kelas, dan menjadi tanggung jawab terhadap perilaku siswa sehari-hari.
3. Pengawas, dapat membuka lebih luas lagi penelitian-penelitian tentang pembelajaran segi kewarganegaraan.
4. Peneliti sendiri, melalui penelaahan secara konseptual materi GBPP PPKN segi kewarganegaraan kurikulum 1994, dan berbagai pengalaman yang dirasakan dalam melaksanakan penelitian ini, maupun berbagai saran dan bimbingan dari pembimbing juga dari semua nara sumber, akan menempa penulis lebih kritis dan tanggap. Lebih penting lagi dapat menambah wawasan dan cakrawala berpikir dalam menghadapi berbagai permasalahan.

